

**LAPORAN TRANSPARANSI  
PELAKSANAAN TATA KELOLA  
PT. BPR BKK KABUPATEN TEGAL  
(PERSERODA)  
TAHUN 2025**



**JL. KS Tubun Kelurahan Pakembaran Kec. Slawi Kab.Tegal  
TELEPON: (0283) 8426555**



## 1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda)
Alamat	Jalan AIP KS. TUBUN PAKEMBARAN SLAWI KEC. SLAWI
Nomor Telepon	(0283) 8426555

### Penjelasan Umum:

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda) pada tahun 2025 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2025 di tengah kondisi perekonomian dan sektor usaha yang sebelumnya pulih.

PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda) memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda) dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di Slawi Kabupaten Tegal. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda) didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Komisaris yang memiliki peranan sentral serta signifikan dalam penerapan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda).

PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda) telah beroperasi lebih dari 20 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu menjadi penyedia layanan perbankan yang terpercaya dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dukungan SDM yang kompeten untuk menciptakan nilai tambah bagi para nasabah.

Dalam penerapan Tata Kelola, PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda) selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur & Infrastruktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan.

Di sepanjang 2025 dan untuk di tahun mendatang, PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda) terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola	
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2. Baik

### Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:



Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.	Nama	KHOJIN
	<b>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</b> Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama adalah sebagai berikut: a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku b. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank c. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya. d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya. e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. f. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai.	
2.	Nama	PRATIWI
	<b>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</b> Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Umum dan Kepatuhan adalah sebagai berikut: a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku b. Menetapkan langkah-langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang c. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain d. Memantau dan menjaga kegiatan usaha BPR agar idak menyimpang dari ketentuan e. Memantau dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lain f. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan terkait dengan Ketentuan OJK yang terbaru.	

### Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

- Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
- Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat.
- Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yaitu : Melakukan evaluasi kinerja (minimal periode per semester)



terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan. Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku.

d. Telah memonitor secara ketat debitur yang mengalami tunggakan mendekati 30 hari dan melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan permasalahan debitur kasus per kasus.

e. Temuan pemeriksaan OJK telah tuntas ditindaklanjuti

f. Semua temuan Audit Intern telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing-masing.

### 3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	M. FARIED WAJDY
	<b>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</b> Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris adalah sebagai berikut: a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank c. Memberikan saran kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas (Otoritas Jasa Keuangan) dan Instansi lainnya.	

#### Rekomendasi Kepada Direksi:

a. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.

b. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat.

c. Secara rutin melakukan untuk pengelolaan sumber daya manusia yaitu : Evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan serta lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan, Mampu bertindak tegas dalam pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku.

d. Memonitor secara ketat debitur yang mengalami tunggakan < 30 hari agar dapat mendeteksi secara dini setiap potensi kegagalan bayar dan dapat mengantisipasinya secara cepat sehingga kredit tidak jatuh pada kolektibilitas 2.

e. Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti dan sudah tuntas paling lambat bulan November 2025

f. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah-langkah perbaikan kontrol agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi yang bersifat signifikan.

g. Melakukan inovasi untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk proses kerja

### 4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

#### Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:

Nihil



## 5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:

nihil

## 6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

### Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	KHOJIN
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	PRATIWI
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

### Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	M. FARIED WAJDY
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

nihil

## 7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

### Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	KHOJIN
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	PRATIWI
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00



#### Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	M. FARIED WAJDY
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

#### Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

nihil

### 8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

#### Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

1.	Nama	KHOJIN
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	PRATIWI
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

#### Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	M. FARIED WAJDY
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

nihil

### 9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

#### Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	KHOJIN
----	------	--------



	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	PRATIWI
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

#### Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	M. FARIED WAJDY
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

#### Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR tidak ada.  
Hubungan Keuangan Anggota Komisaris pada BPR tidak ada.

### 10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

#### Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	KHOJIN
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada



	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	PRATIWI
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

#### Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	M. FARIED WAJDY
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

#### Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

Tidak ada hubungan keluarga Anggota Direksi pada BPR.  
Hubungan Keluarga Komisaris pada BPR tidak ada.

### 11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

#### 1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp467.202.840
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp165.990.462



#### 1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	<b>2 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	<b>Rp32.066.600</b>
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	<b>2 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	<b>Rp17.390.000</b>

#### 1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	<b>2 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	<b>Rp34.782.438</b>
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	<b>2 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	<b>Rp12.367.089</b>

#### 1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	<b>Rp0</b>
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	<b>Rp0</b>

#### 1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan	<b>Rp0</b>



Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	<b>Rp0</b>

#### 2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	<b>1 orang</b>
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	<b>Rp20.000.000</b>
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	<b>Rp0</b>

#### 2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	<b>Rp0</b>
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	<b>Rp0</b>

#### 2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	<b>2 orang</b>
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	<b>Rp8.400.000</b>
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan	<b>Rp0</b>



Komisaris (Rp)	
<b>2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun</b>	
Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	<b>Rp0</b>
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	<b>Rp0</b>

Remunerasi telah sesuai dengan hasil RUPS.

## 12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

<b>1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah</b>	
Rasio (a/b)	<b>2,74 : 1</b>
<b>2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah</b>	
Rasio (a/b)	<b>1,89 : 1</b>
<b>3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah</b>	
Rasio (a/b)	<b>1,53 : 1</b>
<b>4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi</b>	
Rasio (a/b)	<b>3,05 : 1</b>
<b>5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi</b>	
Rasio (a/b)	<b>3,05 : 1</b>

Nihil

## 13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun



1.	Tanggal Rapat	14 Januari 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
<b>Topik/Materi Pembahasan:</b> Menindaklanjuti kelengkapan penilaian dan rekomendasi direksi dari Provinsi Jawa tengah bahwa: 1. Dewan Komisaris untuk dapat memberikan penilaian terhadap AMJ Direksi periode Masa Jabatan 28 Februari 2020 s.d 28 Februari 2025; 2. Bahwa telah dilakukan koordinasi antar Dewan format Penilaian dan rekomendasi atas AMJ Direksi; 3. Telah disusun draf penilaian dan rekomendasi Direksi yang telah disampaikan langsung oleh Komisaris Utama kepada Pemegang Saham Provinsi Jawa tengah yang selanjutnya akan dibahas pada RUPS mendatang.		
2.	Tanggal Rapat	25 Februari 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
<b>Topik/Materi Pembahasan:</b> Menindaklanjuti Surat dari Direksi tentang Permohonan Hapus Buku Kredit Nomor 072/BPR.BKK/Kab. Tgl/II/2025 tanggal 10 Februari 2025. Bahwa telah dilakukan pembahasan terkait persetujuan hapus buku sebanyak 16 debitor dengan hasil sebagai berikut: 1. Hapus buku tidak menghilangkan hapus tagih; 2. Hapus buku kredit dilakukan untuk kredit yang sudah memasuki kategori macet (NPL) dalam jangka waktu lama. 3. Secara akuntansi hapus buku kredit macet dibebankan pada akun penyisihan penghapusan aktiva produktif. 4. Hapus buku hanya bersifat administratif sehingga penagihan terhadap debitor tetap dilakukan.		
3.	Tanggal Rapat	22 Juli 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
<b>Topik/Materi Pembahasan:</b> a. Evaluasi Kinerja Semester 1 tahun 2025; b. Pengadaan Aktiva dan Inventaris; c. Pembahasan Penyaluran Kredit Umum > Rp 200.000.000,- d. Pembahasan Penyaluran Kredit Konstruksi > Rp 200.000.000,- e. Pembahasan SK Dir tentang "PEDOMAN PENETAPAN INSENTIF DAN TARGET REALISASI KREDIT, PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT DAN PENARIKAN KREDIT HAPUS BUKU BAGI PEGAWAI PT BPR BKK KABUPATEN TEGAL PERSERODA".		
4.	Tanggal Rapat	22 Agustus 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
<b>Topik/Materi Pembahasan:</b>		



1. Akan dilakukan sosialisasi kepada pihak eksternal dan sarana untuk menerima pelaporan SAF yang dalam hal ini masuk ke dalam kategori resiko operasional;
2. Mencermati capaian kinerja sampai dengan tanggal 22 Agustus 2025 ada perbaikan outstanding kredit, namun direksi harus tetap berupaya agar outstanding dapat meningkat lebih baik dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, lakukan mitigasi resiko yang ketat sebelum kredit dicairkan sehingga kedepan dapat diminimalisir risiko naiknya prosentase kredit kualitas rendah;
3. SK Insentif yang telah diberlakukan terlihat mempunyai dampak baik untuk kinerja pegawai PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda);
4. Direksi agar melakukan evaluasi individu yang dilakukan setiap bulan dan dilakukan di setiap cabang, pegawai dimintai keterangan terkait kendala yang dihadapi di lapangan diberikan solusi ketika target individu tidak tercapai;
5. Direksi agar membuat konsep produk inovasi pada tahun 2026 agar ada sesuatu yang baru dan tentunya untuk kemajuan PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda);
6. Direksi agar dapat mendukung sarana dan prasarana pegawai sebagai salah satu motivasi;
7. Direksi agar mengagendakan rapat komisisaris bersama pegawai PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda) atas pencapaian kinerja;
8. Direksi agar memperimbangkan kredit konstruksi dapat diproses di cabang, tidak hanya di kantor pusat agar memudahkan nasabah;
9. Direksi agar dapat mempertimbangkan penempatan ABA ke Bank yang dapat memberikan bunga tertinggi (masih dalam rate LPS) untuk menambah laba.

5.	Tanggal Rapat	29 September 2025
	Jumlah Peserta	3 orang

**Topik/Materi Pembahasan:**

1. Komisaris menyampaikan apresiasi atas peningkatan hasil kinerja dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun 2025;
2. Terkait SK Insentif; perlu dilanjutkan melihat capaian bulan September 2025 yang meningkat. Di bulan September 2025 sudah terealisasi outstanding kredit sebesar 4 Milyar Rupiah. Namun direksi harus tetap menerapkan prinsip kehati-hatian, lakukan mitigasi resiko yang ketat sebelum kredit dicairkan sehingga kedepan dapat diminimalisir risiko naiknya prosentase kredit kualitas rendah;
3. Laba perusahaan merupakan hal yang wajib dicapai oleh perusahaan. Jangan dilema atas pencapaian yang telah didapat;
4. Ada beberapa potensi untuk peningkatan kredit; Pembiayaan lahan pabrik gula dan konstruksi. Potensi tersebut untuk dapat dimaksimalkan dengan tetap mengedepankan prosedur;
5. Direksi agar dapat mempertimbangkan penempatan ABA ke Bank yang dapat memberikan bunga tertinggi (masih dalam rate LPS) untuk menambah laba perusahaan. Namun pencapaian DAMAS harus tetap tercapai agar dapat menaikkan asset;
6. Direksi agar dapat mengevaluasi bunga tabungan dan deposito;
7. Direksi agar melakukan evaluasi individu yang dilakukan setiap bulan dan dilakukan di setiap cabang, pegawai dimintai keterangan terkait kendala yang dihadapi di lapangan diberikan solusi ketika target individu tidak tercapai;
8. Direksi agar membuat konsep produk inovasi pada tahun 2026 agar ada sesuatu yang baru dan tentunya untuk kemajuan PT BPR BKK Kabupaten Tegal



	(Perseroda);	
	9. Pencapaian PH belum maksimal; Direksi agar menyusun strategi agar PH yang ada di Kantor Pusat dan Cabang Bojong dapat memperoleh hasil yang maksimal;	
	10. Direksi agar mengagendakan rapat komisaris bersama pegawai PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda) atas pencapaian kinerja di bulan Oktober 2025;	
	11. Direksi agar menjaga komunikasi dan saling support.	
6.	Tanggal Rapat	17 November 2025
	Jumlah Peserta	8 orang
	<b>Topik/Materi Pembahasan:</b> Pembahasan Rencana Bisnis Bank 2026;	

#### 14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun		
1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	MUHAMAD MASROFI, S.SOS.M.Si
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	0 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	2 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	M. FARIED WAJDY
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	4 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	2 kali hadir

rapat Dewan Komisaris dihadiri lengkap oleh anggota Dewan Komisaris.

#### 15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus



Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>

### 1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>

### 1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>



Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>

#### 1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>

nihil

## 16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

### 1.1. Permasalah Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	<b>0 kasus</b>
Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	<b>0 kasus</b>



## 1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	<b>0 kasus</b>
---	----------------

Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	<b>0 kasus</b>
--	----------------

Nihil.

## 17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Nihil.

## 18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

### Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

1.	Tanggal Pelaksanaan	24 Januari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	PERBAMIDA
	Penjelasan Kegiatan	SUMBANGAN BENCANA TANAH LONGSOR KABUPATEN PEKALONGAN
	Jumlah (Rp)	Rp2.000.000
2.	Tanggal Pelaksanaan	24 September 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	DINAS KESEHATAN PROVINSI
	Penjelasan Kegiatan	BANTUAN JAMBAN KELUARGA MISKIN ( PROGRAM INTERVENSI GUBERNUR JATENG)
	Jumlah (Rp)	Rp6.370.000



**PT. BPR BKK KABUPATEN TEGAL (PERSERODA)**  
JL. KS Tubun Kelurahan Pakembaran Kec. Slawi Kab.Tegal  
Telepon: (0283) 8426555

Website: [www.bprbkk-kabupatentegal.com](http://www.bprbkk-kabupatentegal.com), Email: [bprbkktegalperseroda@gmail.com](mailto:bprbkktegalperseroda@gmail.com)

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT. BPR BKK KABUPATEN TEGAL (PERSERODA) untuk tahun 2025. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

SLAWI, 03 Februari 2026

**PT. BPR BKK KABUPATEN TEGAL (PERSERODA)**

Disetujui oleh :

  
  
**M. FARIED WAJDY, S.SOS., M.SI.**  
Komisaris

  
  
**PRATIWI, S.E.**  
Direktur Umum & Kepatuhan